
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di BPKAD Kabupaten Banggai

Asmauliana¹ Nuraisyiah² Samsinar³

¹²³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah mendukung integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan sehingga meningkatkan akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah. Keberhasilan implementasi didukung oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan organisasi, komitmen pimpinan, dan keberlanjutan penggunaan sistem. Namun demikian, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta kendala jaringan internet masih menjadi hambatan dalam optimalisasi SIPD. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan infrastruktur teknologi informasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, implementasi SIPD, kualitas laporan keuangan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in improving the quality of financial statements at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Banggai Regency. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation, while data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and source triangulation. The findings reveal that SIPD has improved the integration of planning, budgeting, financial administration, and reporting processes, resulting in greater accuracy, transparency, accountability, and timeliness of local government financial statements. The successful implementation of SIPD is supported by system suitability, management commitment, and sustainable system utilization. However, limited human resource competencies and unstable internet connectivity remain significant challenges. Therefore, strengthening staff capacity and improving information technology infrastructure are essential to optimize SIPD implementation and enhance the quality of local government financial reporting.

Keywords: Regional Government Information System, SIPD, financial statement quality

Copyright (c) 2026 Asmauliana

□Corresponding author :

Email Address : asmauliana0@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mampu mengintegrasikan proses administrasi dan pelayanan publik, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dikembangkan sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah dalam satu platform nasional sehingga diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang masih dilakukan secara parsial berpotensi menimbulkan duplikasi data, keterlambatan penyusunan laporan, inkonsistensi informasi keuangan, serta meningkatnya risiko kesalahan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SIPD sebagai sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Urgensi penerapan SIPD semakin terlihat dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Secara nasional, mayoritas pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian, masih terdapat pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP akibat kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta belum optimalnya sistem informasi dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian opini audit yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga oleh efektivitas implementasi sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SIPD sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 13 tahun berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Namun demikian, hasil wawancara awal dan observasi lapangan menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem, gangguan jaringan internet pada waktu tertentu, proses penyesuaian terhadap pembaruan aplikasi, serta perlunya koordinasi yang lebih efektif antarperangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP belum sepenuhnya menggambarkan optimalnya implementasi SIPD dalam mendukung kualitas laporan keuangan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Fitriani dan Solikhin (2024) membuktikan bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rezkiaty, Alam,

dan Tenriwaru (2023) menemukan bahwa SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Hasanah dan Djasuli (2025) juga menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, dukungan pimpinan, dan kesiapan organisasi dalam memanfaatkan sistem secara berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antarvariabel sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana implementasi SIPD berlangsung pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terdahulu juga lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas sistem secara umum dan belum menguraikan keterkaitan antara indikator implementasi SIPD dengan karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kajian mengenai implementasi SIPD pada Pemerintah Kabupaten Banggai masih sangat terbatas sehingga belum tersedia gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi SIPD melalui lima indikator utama, yaitu kesesuaian sistem, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan manajemen, dan keberlanjutan penggunaan sistem. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menghubungkan kelima indikator tersebut dengan enam indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga mampu menggambarkan secara lebih komprehensif proses implementasi SIPD berdasarkan pengalaman dan persepsi para pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada bidang sistem informasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SIPD guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena implementasi SIPD secara komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaksana di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai pada Februari–Maret 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena BPKAD merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi pengguna utama SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan

bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi SIPD. Informan terdiri atas Kepala Bidang Akuntansi sebagai informan kunci, sedangkan informan pendukung meliputi kepala subbidang dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator implementasi SIPD dan kualitas laporan keuangan. Wawancara difokuskan pada lima indikator implementasi SIPD, yaitu kesesuaian sistem, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan manajemen, dan keberlanjutan penggunaan sistem. Sementara itu, kualitas laporan keuangan dianalisis berdasarkan indikator relevansi, keandalan, keterbandingan, keterpahaman, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain wawancara, penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif untuk mengamati secara langsung proses penggunaan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan, koordinasi antarpegawai, serta pemanfaatan sarana teknologi informasi di lingkungan BPKAD Kabupaten Banggai. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), regulasi terkait SIPD, Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur (SOP), struktur organisasi, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

serta verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Kabupaten Banggai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan. Sintesis hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan dengan baik, meskipun masih dijumpai beberapa kendala teknis yang memengaruhi optimalisasi penggunaannya. Temuan penelitian dianalisis berdasarkan lima indikator implementasi SIPD, yaitu kesesuaian sistem, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan manajemen, dan keberlanjutan penggunaan sistem.

a. Kesesuaian Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Banggai. Sistem mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan dalam

satu platform yang saling terhubung. Integrasi tersebut mempermudah aparaturnya dalam melakukan pencatatan transaksi, meminimalkan duplikasi data, serta meningkatkan konsistensi informasi keuangan. Seluruh informan menyatakan bahwa SIPD membantu mempercepat proses administrasi dibandingkan sistem sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian sistem menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi SIPD. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi akan lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri dan Santosa (2022) yang menyatakan bahwa kesesuaian sistem merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi SIPD.

b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi di BPKAD Kabupaten Banggai secara umum telah mendukung implementasi SIPD melalui ketersediaan komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa gangguan jaringan internet dan server nasional masih menjadi kendala utama dalam proses input maupun sinkronisasi data. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa aktivitas pengelolaan keuangan mengalami keterlambatan, terutama pada saat akses sistem digunakan secara bersamaan oleh banyak pemerintah daerah. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas kerja telah tersedia dengan baik, namun kualitas jaringan internet masih menjadi faktor yang perlu ditingkatkan agar implementasi SIPD dapat berlangsung lebih optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

c. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi SIPD. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar aparaturnya telah mampu mengoperasikan SIPD dengan baik karena didukung oleh pengalaman kerja serta pelaksanaan bimbingan teknis. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi, khususnya ketika terjadi pembaruan sistem atau perubahan regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparaturnya tidak bersifat statis, melainkan harus terus dikembangkan melalui pelatihan berkelanjutan agar implementasi SIPD dapat berlangsung secara optimal.

d. Dukungan Manajemen

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan pimpinan diwujudkan melalui penyediaan sarana kerja, koordinasi antarbidang, pemberian arahan, serta fasilitasi pelatihan bagi aparaturnya. Dukungan tersebut menciptakan komitmen organisasi dalam menjalankan SIPD sebagai sistem utama pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi SIPD merupakan bagian dari perubahan organisasi yang memerlukan kepemimpinan yang kuat agar proses adaptasi dapat berjalan secara efektif.

e. Keberlanjutan Penggunaan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan secara berkelanjutan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem yang konsisten mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mempertahankan SIPD sebagai sistem utama pengelolaan keuangan daerah. Keberlanjutan penggunaan sistem juga mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis teknologi informasi sehingga proses administrasi keuangan menjadi lebih terintegrasi dan efisien.

Secara keseluruhan, kelima indikator implementasi SIPD saling berkaitan. Kesesuaian sistem memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, infrastruktur harus didukung oleh kompetensi aparatur, kompetensi aparatur diperkuat melalui dukungan manajemen, sedangkan seluruh aspek tersebut dipertahankan melalui keberlanjutan penggunaan sistem. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIPD merupakan hasil dari keterpaduan seluruh indikator, bukan hanya keberhasilan satu aspek tertentu.

2. Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Kontribusi tersebut terlihat dari meningkatnya integrasi proses pengelolaan keuangan, ketepatan penyajian data, kemudahan akses informasi, serta tersedianya mekanisme pengendalian yang mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peningkatan kualitas laporan keuangan dianalisis melalui enam karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan SAP.

a. Relevansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan relevansi laporan keuangan melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Integrasi data dalam satu sistem memungkinkan informasi keuangan diperoleh secara cepat, lengkap, dan mutakhir sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran maupun penyusunan kebijakan keuangan daerah. Selain itu, penggunaan SIPD mengurangi terjadinya duplikasi data dan meningkatkan konsistensi informasi antarunit kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem informasi yang menghasilkan data keuangan yang bernilai bagi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, karakteristik relevansi laporan keuangan semakin meningkat karena informasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat prediktif maupun umpan balik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

b. Keandalan

Implementasi SIPD juga berkontribusi terhadap peningkatan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh transaksi keuangan dicatat melalui prosedur yang telah terstandarisasi dalam sistem sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, mekanisme verifikasi dan validasi data yang tersedia dalam SIPD membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa gangguan jaringan internet dan pembaruan sistem pada waktu tertentu masih berpotensi menghambat proses input data. Namun, kendala tersebut bersifat teknis dan tidak mengurangi keandalan informasi keuangan secara keseluruhan karena telah diantisipasi melalui koordinasi antarpegawai serta prosedur verifikasi internal.

c. Dapat Dibandingkan

SIPD menghasilkan format laporan keuangan yang seragam sesuai ketentuan pemerintah sehingga memudahkan proses perbandingan data keuangan antarperiode maupun antarperangkat daerah. Standarisasi format dan kode akun dalam SIPD

menghasilkan informasi yang lebih konsisten sehingga mempermudah evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD telah mengurangi perbedaan format penyajian laporan yang sebelumnya sering terjadi ketika proses penyusunan laporan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini memperkuat karakteristik keterbandingan sebagaimana diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Dapat Dipahami

Karakteristik keterpahaman juga mengalami peningkatan melalui implementasi SIPD. Penyajian informasi keuangan dalam format yang sistematis, penggunaan kode akun yang seragam, serta tersedianya menu pelaporan yang terstruktur memudahkan pengguna dalam memahami isi laporan keuangan. Informan penelitian menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan SIPD lebih mudah ditelusuri karena setiap transaksi memiliki jejak pencatatan (*audit trail*) yang jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya mempermudah penyusunan laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang disajikan sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna internal maupun pihak eksternal yang berkepentingan.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan yang paling merasakan manfaat implementasi SIPD. Integrasi proses pengelolaan keuangan memungkinkan data diperbarui secara langsung (*real time*), sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya. Meskipun penelitian menemukan kendala berupa gangguan jaringan internet dan server pada waktu tertentu, secara umum SIPD mampu mempercepat proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Peningkatan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SIPD telah meningkatkan efisiensi proses administrasi keuangan daerah.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Struktur akun, format laporan, serta mekanisme pencatatan dalam SIPD disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga membantu aparatur dalam menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan keenam karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui integrasi sistem, standarisasi proses, peningkatan akurasi data, serta percepatan penyusunan laporan keuangan. Keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aplikasi SIPD, tetapi juga oleh keterpaduan antara kesesuaian sistem, infrastruktur teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, dan keberlanjutan penggunaan sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi SIPD dan kualitas laporan keuangan bersifat sistemik. Artinya, kualitas laporan keuangan tidak meningkat hanya karena penggunaan aplikasi SIPD, melainkan karena implementasi SIPD didukung oleh kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memungkinkan sistem dimanfaatkan secara optimal. Sinergi kelima indikator implementasi

tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap 33 artikel jurnal nasional dan internasional, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM mengalami pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada faktor administratif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan faktor psikologis, institusional, dan teknologi. Dalam perkembangan tersebut, tax awareness, tax morale, trust in government, dan modernisasi sistem perpajakan muncul sebagai variabel yang semakin dominan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Tax awareness terbukti menjadi faktor penting yang membentuk kesadaran wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Tax morale menunjukkan peran yang sangat kuat sebagai motivasi intrinsik yang mendorong kepatuhan sukarela, bahkan dalam beberapa penelitian ditemukan sebagai determinan yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Di sisi lain, trust in government memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berperan dalam membentuk kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara tax morale, tax awareness, trust in government, dan modernisasi sistem perpajakan tidak bersifat parsial, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM. Tax awareness dan tax morale merepresentasikan faktor internal wajib pajak yang berkaitan dengan kesadaran dan motivasi moral. Trust in government merepresentasikan faktor institusional yang membangun legitimasi dan keyakinan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan merepresentasikan faktor eksternal berbasis teknologi yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih mudah dan efisien. Integrasi keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif tunggal, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor perilaku, faktor kelembagaan, dan faktor teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan perspektif multidimensional dalam studi kepatuhan pajak UMKM sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya integrasi faktor psikologis, institusional, dan teknologi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris yang mengintegrasikan tax morale, tax awareness, trust in government, dan modernisasi sistem perpajakan dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu menguji secara empiris bagaimana interaksi antara faktor psikologis, institusional, dan teknologi dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis yang lebih kompleks, seperti Structural Equation Modeling (SEM) atau Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Pengujian

model yang lebih komprehensif diharapkan mampu menghasilkan penjelasan yang lebih kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian mendatang juga perlu mempertimbangkan penggunaan variabel mediasi dan moderasi yang relevan untuk menjelaskan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa trust in government dapat memengaruhi kepatuhan pajak melalui tax awareness, sementara penelitian lain menemukan hubungan langsung antara kedua variabel tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat mekanisme hubungan yang belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji peran tax awareness sebagai variabel mediasi atau tax morale sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara trust in government dan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memasukkan variabel lain seperti keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, literasi digital, religiositas, dan persepsi korupsi untuk memperluas model penelitian yang ada. Pengembangan model tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM dalam berbagai konteks.

Referensi

- Daffa, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.26740/jkp.v10n1.p45>
- Fitriani, A. (2021). Tantangan Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD): Analisis terhadap Keterbatasan Jaringan, Pelatihan, dan Infrastruktur. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah*, 4(3), 201–215. <https://doi.org/10.3456/jtikp.2021.4.3.201>
- Fitriani, S., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(1), 78–95. <https://doi.org/10.26740/jakd.v12n1.p78>
- Fitriasari, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Mutu Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.26740/japd.v13n1.p45>
- Hasanah, U., & Djasuli, M. (2025). Telaah Implementasi SIPD dalam Institusi Pengelola Fiskal dan Aset Daerah Tingkat Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.26740/jap.v13n1.p45>
- Hidayat, N., & Amelia, R. (2021). Pengaruh Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.24843/JAKI.2021.v18.i02.p05>
- Kurniawan, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pertanggungjawaban Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.5678/japuk.2022.7.1.45>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=5qIvBAAQBAJ
- Nasution, M. (2023). Peran Pengelolaan Keuangan sebagai Mediator dalam Hubungan Penguasaan SIPD dan Mutu Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Publik*, 11(2), 78–95. <https://doi.org/10.26740/jkap.v11n2.p78>
- Nugroho, B., & Kurniasih, D. (2020). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pemerintah*, 6(1), 12–25.
<https://jaki.kemenkeu.go.id/index.php/jaki/article/view/316>
- Nugroho, S., & Lestari, D. (2022). Fire Hazard Assessment in Public Dining Areas. *Jurnal K3 Indonesia*, 9(1), 55–68.
- Nurhidayat, A., & Widodo, B. (2021). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi dalam Meningkatkan Akurasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 123–135.
<https://doi.org/10.1234/jaki.2021.5.2.123>
- Paat, D., & Saleh, A. (2025). SIPD dan Studi Mengenai Mutu Laporan Keuangan di Kota Cimahi. *Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Publik*, 14(1), 78–95.
<https://doi.org/10.26740/jkap.v14n1.p78>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (2019). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128834/permendagri-no-70-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 71 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 1 (2010).
<https://peraturan.go.id/id/pp-no-71-tahun-2010>
- Pramana, C., Suryanto, T., & Wulandari, A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Lembaga Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 11(2), 112–129.
<https://doi.org/10.26740/jad.v11n2.p112>
- Putra, I. K., & Andayani, S. (2021). Implementasi Basis AkruaI dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Pemerintah*, 5(2), 134–148.
<https://doi.org/10.7890/jaap.2021.5.2.134>
- Putri, D. A., & Andayani, W. (2022). Peran Pengembangan Profesional Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Era Perubahan Regulasi dan Sistem Informasi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Dan Keuangan Publik*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.26740/japkp.v9n1.p45>

- Putri, N. A., & Santosa, P. I. (2022). Pengukuran Implementasi Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) Menggunakan Indikator Sistem Informasi Organisasi Publik. *Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi*, 10(1), 112-125. <https://doi.org/10.6789/jisi.2022.10.1.112>
- Rahman, S., & Amelia, N. (2023). Peran Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Modul Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD). *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi*, 9(1), 89-102. <https://doi.org/10.7890/jsit.2023.9.1.89>
- Rahmawati, E., & Suharto, T. (2022). Peran Laporan Keuangan Pemerintah dalam Evaluasi Tanggung Jawab Publik: Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Dan Keuangan Daerah*, 7(1), 78-92. <https://doi.org/10.5678/japkd.2022.7.1.78>
- Rezkiaty, N., Alam, M. S., & Tenriwaru, A. (2023). Evaluasi Implementasi SIPD di Instansi Pengelola Keuangan dan Aset di Tingkat Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Daerah*, 10(2), 112-129. <https://doi.org/10.26740/jpkd.v10n2.p112>
- Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) terhadap Transparansi dan Kualitas Keuangan Daerah: Peran Efektivitas Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Keuangan Dan Akuntansi Daerah*, 8(2), 67-80. <https://doi.org/10.9012/jkad.2023.8.2.67>
- Sari, N., & Widyaningsih, S. (2022). Analisis Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Daerah dalam Perspektif Akuntansi Akrua. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 145-158. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jrak/article/view/15624>
- Setiawan, D., & Nuraini, A. (2022). Dampak Pelanggaran Aturan Audit terhadap Proses Audit dan Kepercayaan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Publik Dan Akuntansi*, 11(1), 78-95. <https://doi.org/10.26740/jkpa.v11n1.p78>
- Syamsuddin, M., Ahmad, R., & Lestari, P. (2021). Komitmen Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Penggunaan Substantif Modul SIPD: Kajian Kelembagaan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 156-170. <https://doi.org/10.4567/jakp.2021.6.2.156>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2B ayat (2). (1945).
- Yulianti, R., & Pratama, A. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 11(2), 45-56. <https://ojs.unm.ac.id/jae/article/view/24567>